

OMBUDSMAN BEBERKAN SULITNYA AKSES PENDIDIKAN DI NTT

Senin, 24 Juni 2024 - ntt

RADARNTT, Kupang - Akses pendidikan yang layak belum dirasakan oleh semua anak, khususnya anak-anak di wilayah 3 T (Tertinggal, Terpinggir dan Terluar) seperti banyak daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Demikian tegas Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton dalam program Dialog Kupang Pagi di RRI, Kamis (20/6/2024).

"Kondisi pendidikan yang demikian disebabkan beberapa hal, pertama; tingkat ekonomi masyarakat masih rendah. Kedua; akses lokasi yang sulit dijangkau. Ketiga; kurang tenaga pengajar. Keempat; fasilitas pendidikan yang tidak merata. Banyak gedung sekolah yang rusak sedang dan berat," jelas Beda Daton.

Darius Beda Daton menegaskan bahwa, pendidikan adalah hak dasar warga yang diatur konstitusi. Karena itu setiap anak seharusnya memiliki hak untuk mendapat pendidikan yang layak agar mereka memiliki masa depan dan meraih cita-cita mereka.

"Akses pendidikan di NTT belum sama juga disebabkan karena biaya pendidikan yang relatif mahal. Pungutan satuan pendidikan di sekolah negeri yang berkisar Rp50.000 hingga Rp200.000 per siswa per bulan terasa cukup memberatkan, terutama bagi para siswa yang orang tuanya tidak mampu. Diperlukan afirmasi khusus bagi anak-anak tidak mampu agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk sekolah," tegas Beda Daton.

Beda Daton membeberkan, masih banyak anak-anak yang tidak bisa mengambil ijazah setelah menamatkan pendidikan di sekolah menengah karena tidak mampu membayar tunggakan pungutan satuan pendidikan. Karena itu khusus pungutan satuan pendidikan dan sumbangan Komite, perlu dihitung dengan baik agar tidak memberatkan orang tua tidak mampu.

"Untuk menentukan besaran pungutan satuan pendidikan, sekolah wajib menghitung berapa kebutuhan riil siswa per tahun setelah dihitung kebutuhan yang didanai BOS. Tahapan yang memerlukan kontribusi orang tua diperlukan komunikasi bersama agar transparan serta penggunaannya akuntabel," tandasnya.

Dalam Dialog RRI Kupang dengan tema; tantangan pendidikan di NTT, upaya meningkatkan akses dan mutu. Dihadiri Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi NTT Ayub Sanam dan Direktur Pasca Sarjana Undana Kupang, Prof. Tans Feliks.

Dinas Pendidikan Provinsi NTT menggambarkan kondisi pendidikan di NTT mulai dari mutu layanan pendidikan, akses dan tata kelola pendidikan (akreditasi). Saat ini, provinsi NTT memiliki jumlah sekolah menengah sebanyak 1.013 sekolah baik negeri maupun swasta yang menampung 351.577 siswa/siswi.

Angka ini mencatat NTT sebagai 10 besar provinsi dengan sekolah menengah terbanyak dimana 615 adalah SMA dan 351 SMK serta 47 SLB. 164 sekolah diantaranya terakreditasi A.

Jumlah guru yang mengajar sebanyak 31.000 dan hanya 8000 yang berstatus PNS. Dari sisi kompetensi guru, jumlah guru SMA yang disertifikasi baru 5000-an dari 18.000 guru atau baru 22 persen. Sedangkan untuk tingkat SMK, guru sertifikasi baru 2.585 dari 9000 guru SMK.

Ratio guru di NTT adalah 1 : 11 siswa dibanding ratio guru nasional 1 : 36 siswa. Artinya jumlah guru di NTT sudah cukup. Yang perlu menjadi atensi seluruh stakeholder pendidikan adalah mutu layanan pendidikan, akses yang belum merata dan tata kelola. (TIM/RN)